

Globethics Repository



Radikalisme dan Konflik Beragama Pada Pemilu Presiden 2014

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository.
More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy
of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Journal volume
Authors	Abdullah, Mudhofir
Publisher	IAIN Surakarta
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-07-12 03:23:39
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/158915

RADIKALISME DAN KONFLIK BERAGAMA PADA PEMILU PRESIDEN 2014¹

Oleh: Mudhofir Abdullah²

Abstract: *Indonesia is the fifth largest democracy in the world. The majority of the population is Muslim and is the world's Muslims. Viewed from this aspect, Islam has played an important role for the growth of democracy and multiculturalism. This fact reject the view of some Western scientists who claim that Islam is incompatible with democracy. The people of Indonesia have proven to the world that Islam is here to become agents of democracy. However, the road to democracy must continue in order to build a civil society. Civil society will pave the way for the establishment of a democratic and multicultural society, so that the implementation of Pilpres can run smoothly without conflict.*

Keywords: *Radikalisme, konflik beragama, Pilpres, Islam, moderasi*

A. Pendahuluan

Pemilu Presiden 2014 ini hanya diikuti oleh dua pasangan Capres-Cawapres. Ini pertamakalinya terjadi dalam sejarah Pilpres sejak 2004. Dengan demikian kompetisi dua pasangan ini bersifat *head to head* dan sangat ketat. Didukung oleh partai-partai koalisi pengusung, dua pasangan Pilpres kali ini membelah dua kubu dengan polarisasi yang sangat tajam. Prabowo-Hatta merepresentasikan sayap hijau dan Jokowi-JK mengartikulasikan sayap merah. Meski dua pasangan tersebut semua beragama Islam, tapi publik membacanya sebagai kompetisi antara sayap hijau dan sayap merah.

Karena itu, Pilpres 2014 ini rentan terhadap konflik horisontal. Konflik ini bisa dipicu oleh kecurigaan antar kelompok umat beragama baik antar maupun intra. Jika kita memerhatikan berita-berita di media sosial dan juga media (massa dan elektronik), isu-isu SARA sudah mulai terang-terangan dikemukakan. Para oknum tak segan-segan mencurigai kelompok lain sebagai kepanjangan tangan dari Kristen, China dan atau Barat. Bahkan menyatakan bahwa jika salah satu pasangan ini menang, maka akan ada huru-hara sebagai protes. Sebagian lainnya memandang bahwa pertarungan Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta adalah artikulasi dari pertarungan Islam dan Kristen, Muhammadiyah dan NU, atau pribumi dan non pribumi.

Cara pandang sebagian masyarakat tersebut terbaca dari sejumlah khutbah, pengajian di majelis taklim, perbincangan di tempat-tempat ibadah, dan lain-lain. Juga dapat diakses di media sosial (*facebook, twitter, maupun blog*). Secara semiotika, berita-berita tersebut menunjukkan sebuah potensi dan bahaya laten yang sewaktu-waktu bisa meledak. Juga menunjukkan bahwa musuh-musuh imajiner telah ada di alam bawah sadar mereka dan sedang diincar untuk dilawan bila saatnya tiba. Cara baca semacam ini adalah khas cara baca kaum radikal (termasuk radikalisme agama) yang selalu menerapkan teori konspirasi. Teori konspirasi itu berpijak pada patokan kecurigaan dan meletakkan secara oposisi biner antara 'kami-mereka' (*minna wa minhum*).

¹Makalah ini pernah disampaikan dalam Diskusi Ilmiah di Direktorat Pertahanan, Jakarta 12 Juni 2014.

²Dr. Mudhofir Abdullah adalah Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga IAIN Surakarta Periode 2011-2105.

Relasi oposisi biner antara ‘kami-mereka’ kini menggejala dalam pentas demokrasi Pilpres 2014. Meskipun jumlahnya kecil, namun untuk tujuan-tujuan politik teori konspirasi ini bisa sangat efektif memainkan konflik horisontal. Potensi konflik memiliki peluang besar untuk bertransformasi menjadi konflik terbuka. Ini ditunjukkan oleh *black campaign* dari para oknum yang dikaitkan dengan SARA. Tak pelak, suhu politik nasional pun memanaskan. Pertanyaannya, apakah potensi konflik ini benar-benar akan menjadi nyata menjelang dan pasca Pilpres? Peran-peran apa yang harus dimainkan para elit politik dan elit agama dalam mencegah potensi konflik? Apa yang harus dilakukan agar proses demokrasi dan proses peralihan kekuasaan berjalan mulus tanpa noda sebagaimana pernah terjadi pada setiap peralihan kekuasaan di masa lalu?

Beberapa pertanyaan di atas akan coba dibahas dengan mengaitkannya pada konteks-konteks sosio-politik yang pernah terjadi dalam sejarah peralihan kekuasaan dan juga dalam perkembangan politik terakhir menjelang Pilpres 9 Juli 2014. Analisis paper ini akan memanfaatkan berita-berita di media massa dan elektornik serta dokumen-dokumen yang relevan dengan topik.

B. Mewaspada Politik Aliran

Satu fakta yang tidak bisa dihindarkan adalah bahwa setiap bangsa memiliki agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduknya. Philipina dengan katoliknya; India dengan Hindunya; Amerika Serikat dengan Kristennya; dan Indonesia dengan Islamnya. Agama-agama tersebut menggerakkan energi kehidupan politik, tradisi, budaya, ekonomi, dan bahkan pandangan hidupnya.³ Tak heran jika agama-agama di sebuah negara ikut memainkan peran kunci. Tak terkecuali Indonesia.

Dengan kenyataan itu, agama tak bisa dilepaskan begitu saja dari kancan politik. Yang saya maksud agama dalam tulisan ini mencakup agama terorganisir maupun agama dalam pengertian privat – agama yang hanya diyakini sebagai sistem dan pandangan hidup seseorang, meskipun orang tersebut tak secara terang-terangan berafiliasi pada agama terorganisir lainnya. Dalam praktik, keyakinan seseorang pada agama tertentu mendorong pada pilihan-pilihan politik tertentu. Orientasi politik seseorang, khususnya di Indonesia, masih bersifat kategoris. Trikotomi Clifford Geertz tentang santri, abangan, dan priyayi – dalam batas-batas tertentu – masih berlaku. Kita masih menyaksikan dengan jelas, terutama di Jawa, bahwa seorang santri afiliasi politiknya cenderung ke PKS, PKB, PAN, PBB dan juga ke partai nasionalis yang agak hijau seperti Golkar, Demokrat, Gerindra dan atau Nasdem-Hanura. Sementara seorang abangan cenderung berafiliasi pada partai PDI-P, Golkar, Demokrat, Gerindra, dan sebagian ke PAN, PKB, dan lain-lainnya. Walaupun orientasi politik ini terus-menerus berubah sejalan dengan keterbukaan informasi, namun watak dasarnya masih tetap hinggap.

Jadi, politik aliran sebagaimana disebut di atas menurut saya masih bisa dirasakan. Dalam konteks Pilpres 2014, koalisi pendukung Jokowi-JK adalah kelompok “abangan” selain PKB. Sementara di kubu Prabowo-Hatta adalah barisan “santri” yang mengusung simbolisme agama. Deklarasi antara dua pasangan tersebut pun menghadirkan warna yang kontras. Jokowi-JK tidak

³Bandingkan dengan karya Jennifer L. Epley, *Voices of the Faithful: Religion and Politics in Contemporary Indonesia*, Dissertation (Michigan: The University of Michigan Press, 2010), h. 27.

pakai peci dan simbol-simbol agama, sementara pasangan Prabowo-Hatta mengusung simbol-simbol agama dengan asesoris santri. Pandangan ini tentu mendorong sentimen-sentimen politik dan menghadirkan perasaan keterikatan pada orientasi politik berbalut keyakinan agama.

Tentu saja, analisis ini bisa diperdebatkan. Namun, wacana politik aliran yang mengemuka dalam pembicaraan publik nyata-nyata ada.⁴ Dari sudut pandang kaum radikal, realitas politik Pilpres 2014 dibaca sebagai artikulasi dari pertarungan antara “kami dan mereka”. Kata “kami” mencerminkan sebuah nada teologisme yang selalu menjadi hakim dan kata “mereka” adalah pihak yang harus dihakimi. Mereka (kaum radikal) membaca bahwa Capres tertentu mengusung kepentingan asing dan atau diboncengi agama tertentu – ini berakar dari wakilnya yang beragama lain dan bersuku lain (mengacu pada Basuki Cahaya Purnama/Ahok dan F.X. Rudiatmo Wakil Walikota Surakarta). Dalam membaca fakta ini, kaum radikal meletakkannya ke dalam bingkai teori konspirasi. Mereka kurang mencermati bahwa dua pasangan tersebut memiliki pendukung dari kalangan santri dan juga massa Islam. Fakta ini seperti tertutupi oleh sentimen politik aliran yang sudah dibangun sebelumnya. Dalam hal ini, kaum radikal memakai kaca mata yang bersifat linier dan mengabaikan fakta-fakta lain.

Potensi konflik horisontal, dengan demikian, akan mengalami masa-masa kritis di masa kampanye. Meski tim kampanye dari dua pasangan Capres-Cawapres terdiri dari para intelektual yang memiliki visi kebangsaan jelas, namun belum tentu diikuti di tingkat akar rumput. Penerjemahan bahasa kampanye dari para elit politik tidak selalu sejalan di level massa. Seperti sebuah buku atau tulisan, maknanya sudah menjadi milik para pembacanya. Meminjam istilah Roland Barthes bahwa sekali buku atau tulisan terbit, maka penulisnya mati.⁵ Artinya makna pesan kampanye politik akan bebas diterjemahkan oleh para pendengarnya. Itulah sebabnya, bahasa kampanye harus sedemikian rupa sehingga tidak disalahpahami dan bersifat mencerahkan massa di akar rumput. Di sini peran kaum elit politik sangat penting dan dapat menentukan hitam-putihnya demokrasi dalam konteks masyarakat kita yang sangat majemuk.

C. Demokrasi dalam Pandangan Kaum Radikal

Sebagian umat Islam menolak demokrasi. Demokrasi menurut mereka adalah impor dari Barat. Pandangan semacam ini begitu mendalam dalam pemikiran mereka sehingga proses demokrasi dianggap sebagai cara setan. Hizbut Tahrir dan kelompok Wahabi adalah salah satu dari pemeluk pendapat ini. Karena pendapatnya ini mereka menjadi kelompok garda depan dalam demonstrasi-demonstrasi melawan kebijakan pemerintah dan atau lembaga-lembaga negara yang dianggap mengancam agama (baca: mengancam teologi/mazhab mereka).

Dua kelompok ini (HTI dan Wahabi) sangat aktif pada masa-masa transisi politik seperti Pileg dan Pilpres. Suara dua kelompok ini kini sangat nyata baik di media sosial maupun dalam halaqah-halaqah di kampus. Jumlah mereka di Indonesia cukup besar sehingga gerakan-gerakannya tidak boleh dianggap remeh. Jika di masa-masa transisi politik mereka mengusung formalisme Syari’ah, maka di masa-masa tenang mereka mempromosikan anti Ahmadiyah, anti-Barat, anti-

⁴Politik aliran dalam batas-batas tertentu pun masih ada di Amerika Serikat, meski tidak mendapatkan tempat. Lihat karya A. James Reichley, *Religion in American Public Life* (Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1985), h. 9.

⁵Lihat Roland Barthes, *Elements of Semiology* (New York: Hill and Wang, 1976).

Syi'ah, dan anti JIL (Jaringan Islam Liberal). Isu-isu yang diusung bisa berganti-ganti sesuai dengan situasi yang berubah. Tetapi, ada satu prinsip yang tidak berubah yakni menjaga ortodoksi teologi agama mereka.

Karena wataknya yang sangat ideologis dan teologis, mereka memiliki jiwa berani mati. Sialnya, bila wataknya ini mendapatkan tempat dalam masa-masa kampanye Pilpres 2014. Sejarah telah menunjukkan bahwa setiap alih kekuasaan selalu ada kerusuhan dan memakan korban—sasaran utamanya adalah agama minoritas dan suku minoritas. Meski pelakunya belum tentu dua kelompok ini, namun agitasi-agitasi mereka ikut berkontribusi pada pecahnya konflik horisontal.

Mereka juga termasuk kelompok yang solid. Di kampus, di masjid, dan tempat-tempat tertentu selalu mengadakan halaqah dan membicarakan isu-isu yang hangat. Mereka memercayai pada hanya guru-guru mereka yang ditokohkan dan merupakan *founding father* gerakan mereka. Jadi, mereka hanya membaca buku-buku di dalam lingkaran jaringan mereka saja. Mereka tidak keluar dari cangkang jaringan mazhabnya sehingga tak pernah memperoleh wawasan-wawasan lain yang lebih kritis. Dengan terkurung pada jaringan mazhab mereka, maka sulit keluar dari prasangka-prasangka terhadap *the others* atau sang *liyan*.⁶ Dari sinilah nilai-nilai demokrasi menjadi mustahil untuk dipahami mereka dengan jernih. Mereka apriori dan menempatkan diri mereka di tempat Tuhan yang selalu benar. Mereka jatuh pada sikap otoritarianisme baik dalam politik maupun dalam menafsirkan teks-teks kitab suci.⁷

Dalam konteks Pilpres 2014, proses demokrasi bisa terseok-seok bila kelompok ini menghadang proses-prosesnya melalui agitasi-agitasi anti-demokrasi. Itulah sebabnya, mereka kini paling kritis terhadap Wakil Gubernur DKI Basuki Cahaya Purnama yang beragama Kristen dan memimpin mayoritas warga Muslim di Jakarta. Mereka tidak bisa menerima demokrasi yang memilih pasangan Jokowi-Ahok. Karena pasangan ini legal dan menang yang didukung oleh warga Jakarta, maka mereka hanya memendam kekecewaan. Kekecewaan ini terus dibawa hingga Pilpres 2014 yang mengusung Jokowi menjadi Capres PDI-P.

Di media sosial, *blog*, dan juga sms-sms gelap, isu SARA tentang Ahok yang akan menggantikan Jokowi jika ia menang dalam Pilpres ini menunjukkan potensi kerusuhan. Di antara isi sms dan pesan *facebook* adalah pesan yang memojokkan Jokowi dan Ahok. Jokowi dianggap bertanggung jawab atas kondisi Jakarta yang akan dipimpin seorang Kristiani. Jokowi juga dianggap mewarisi Wakil Walikota yang beragama Kristen di Solo. Berita-berita yang bernada SARA ini mengancam keamanan negara dan ketertiban sosial. Pilpres kali ini, karena itu, memiliki ancaman yang jauh lebih serius ketimbang tahun 2004 dan 2009. Faktor Capres Jokowi yang dianggap “abangan” dan merepresentasikan *the other* menjadi penting untuk dicermati dan menjadi kutub “kebencian” bagi kaum radikal.

Bagaimana dengan Prabowo? Dalam pembicaraan kaum radikal di Solo, misalnya, Prabowo dianggap tidak lebih baik dari Jokowi dilihat dari asal-usul agama keluarganya. Keluarga Prabowo oleh mereka dianggap tidak jelas. Ibu dan keluarganya diisukan masih beragama Kristen dan

⁶Baca karya Mudhofir Abdullah, *Jihad Tanpa Kekerasan* (Jakarta: Inti Medina, 2009).

⁷Khaled Abou El Fadhl menyebutkan bahwa ketika ayat-ayat Kitab Suci ditafsirkan otoriter maka hasilnya berupa perilaku-perilaku yang otoriter dan memiliki dorongan untuk menyerang yang lain yang dianggap berbeda dengan dirinya. Dikutip kembali dalam Mudhofir Abdullah, *Jihad Tanpa Kekerasan*, h. 46 dst.

menurut mereka tidak layak untuk memimpin umat Islam Indonesia.⁸ Namun mereka masih menerima Prabowo Subianto sebagai pilihan terbaik dari dua keburukan (dari sisi agama). Apalagi setelah Prabowo berkoalisi dengan partai-partai Islam, kaum radikal mau menerima dan memahami. Nada curiga kaum radikal terhadap Capres, tentu saja, mengartikulasikan ketidakpercayaan pada proses demokrasi. Ini menjadi lanskap yang mewarnai proses Pilpres 2014 dengan suhu politik sangat hangat.

Perlu ditambahkan bahwa kaum radikal membaca situasi politik Pilpres di Tanah Air dengan kacamata politik internasional, terutama tentang dunia Islam. Gerakan mereka bersifat transnasional. Mereka membaca isu-isu dunia Islam yang dianggap telah dizalimi oleh politik konspirasi Barat-Kristen-Yahudi. Berita-berita tentang situasi politik Timur Tengah seperti: konflik Israel-Palestina, tergulingnya mantan presiden Mesir Muhamad Nursi, dan terjadinya Arab Spring dibaca sebagai produk dari konspirasi Yahudi-Barat. Jadi, kaum radikal di sini dipenuhi kecurigaan karena mencampurkannya dengan situasi politik dunia.

Dengan cara baca semacam ini musuh-musuh imajiner kaum radikal akan terus lahir dan mereka pun terus bergerak tanpa henti. Kaderisasinya cukup sistematis dan kini telah “merebut” masjid-masjid atau mushala-mushala yang sudah ditinggalkan oleh jamaah NU dan Muhammadiyah yang mulai sibuk berpolitik. Beberapa kasus menunjukkan bahwa sebuah masjid yang awalnya independen kemudian diklaim sebagai masjidnya kelompok kaum radikal. Harus dipahami bahwa kaum radikal lebih intens berada dan mengadakan kegiatan di masjid-masjid ketimbang kelompok manapun. Masjid telah menjadi *base camp* dan bila tidak ada pembinaan akan menjurus pada terbentuknya kantong-kantong radikalisme.

Saya kira, gejala semacam ini dapat dilihat dengan mata telanjang. Apalagi kampus-kampus, terutama dari perguruan tinggi umum, khalaqah-khalaqah begitu marak. Tentu saja, tidak semua khalaqah itu radikal. Tetapi, bila pemimpinnya radikal maka kerumunan itu bisa terpengaruh menjadi radikal. Infiltrasi ideologi dan teologi sangat mudah masuk pada khalaqah-khalaqah, misalnya, melalui kajian tafsir yang sudah dikerangkeng ke arah radikalisme. Pilihan tafsir pun sudah dipilih, misalnya, karya-karya Sayid Qutub, Ayman Jawahiri, dan lain-lainnya. Melalui kajian yang sudah radikal, maka akibat-akibatnya bisa diduga, yakni cenderung radikal. Imam Samudera atau Abdul Azis — pelaku tragedi Bom Bali — juga awalnya membaca buku-buku tentang jihad dari karya-karya tersebut. Deskripsi-deskripsi tersebut lalu mengendap ke dalam pikiran dan alam bawah sadarnya.⁹ Demikianlah, akhirnya Samudera terdorong kuat untuk pergi ke Afghanistan ikut membela kaum Muslimin yang dizalimi. Dan setelah pulang membawa segugus ideologi yang lebih radikal hingga akhirnya menjadi aktor intelektual dalam tragedi Bom Bali.¹⁰ Contoh-contoh serupa dapat ditemukan dalam pelbagai kasus terorisme di mana berawal dari pengajian-pengajian yang radikal lalu terdorong untuk melakukan jihad dalam pengertian yang sudah ditafsirkan radikal.

Jika radikalisme pikiran di atas bertemu dengan situasi politik Tanah Air seperti Pilpres 2014 yang diasumsikan sebagai pertarungan antara Islam versus Kristen atau Muhammadiyah versus NU atau Santri versus Abangan maka akan berpotensi pada konflik-konflik horisontal. Tentu saja, asumsi-asumsi ini tidak sepenuhnya bisa demikian karena dalam politik banyak faktor yang bermain. Hanya saja, fakta-fakta ini menjadi *clues* bagi pencegahan.

⁸Menurut beberapa sumber, hal ini di antaranya dikemukakan oleh Ketua Majelis Tafsir al-Qur'an (MTA) Drs Ahmad Sukino. MTA merupakan kajian tafsir al-Qur'an yang memiliki jamaah ribuan di sejumlah pelosok di Jawa. Lembaga ini juga memiliki jaringan radio sebagai sarana penyebar ideologi dan teologi MTA. MTA, karena itu, dalam batas-batas tertentu telah menjadi lembaga pesaing NU dan Muhammadiyah.

⁹Lihat Mudhofir Abdullah, *Jihad Tanpa Kekerasan*, h. 47.

¹⁰ Baca Muhammad Hanif Hassan, *Unlicensed to Kill: Countering Imam Samudra's Justification for the Bali Bombing* (Singapore: Singapore Book Press, 2005).

D. Potensi Konflik Tripartit

Pilpres 2014 dengan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa telah menciptakan polarisasi tajam antara faksi-faksi agama dan golongan. Meski sebenarnya di dalam dua kubu ada kelompok-kelompok yang berbeda dan mencerminkan warna pelangi, namun bagi banyak orang dibaca tidak demikian. Kristen, NU, non-pri, dan abangan dianggap berada di kubu Jokowi-JK. Islam, Muhammadiyah, Santri, pribumi dipandang berada di kubu Prabowo-Hatta. Trikotomi ini kini dengan kental mewarnai persepsi publik, meski kalangan terpelajar mungkin tidak membaca demikian. Tapi dalam sejumlah media sosial dan *blog* dikategorikan sebagai pertarungan dua kubu yang bersifat diametral.

Dengan menganalisis media, tersirat bahwa ada tiga pandangan besar tentang kompetisi antara Jokowi-JK versus Prabowo-Hatta. *Pertama*, kelompok yang memandang sebagai kompetisi antara Kristen vs Islam. Ini dianut oleh sebagian besar kelompok-kelompok Islam radikal (bahkan dari sejumlah akademisi). Juga kelompok-kelompok yang terprovokasi oleh media sosial dan memercayainya sebagai sebuah fakta. *Kedua*, golongan yang membaca sebagai kompetisi antara NU vs Muhammadiyah. Ini dianut oleh faksi-faksi NU baik dari kalangan awam maupun akademisi. Hatta Rajasa dan Amien Rais yang selalu tampil bersama Prabowo dianggap sebagai representasi dari Muhammadiyah dan PAN. Sebagian elit NU merasa terancam jika kubu ini terpilih dan posisi-posisi strategis di Kementerian Agama akan sulit dipertahankan. *Ketiga*, non-pri vs pribumi. Kompetisi Pilpres 2014 dipahami sebagai kompetisi antara non-pri versus pribumi. Ini dianut oleh elit-elit Islam dan elit-elit politik partai.

Capres Joko Widodo menurut pandangan ketiga dianggap sebagai non-pribumi karena diduga ayahnya beretnis China.¹¹ Isu ini sebenarnya berkembang sejak dia dicalonkan sebagai gubernur Jakarta, terutama diinisiasi oleh Rhoma Irama dan lain-lainnya. Isu ini terus dikembangkan untuk tujuan *black campaign*. Terlepas dari benar tidaknya, isu ini sangat rasis dan mampu memicu sentimen anti-China dalam Pilpres 2014.¹² Apalagi dibumbui bahwa di belakang Jokowi ada kepentingan para cukong yang akan mengambil keuntungan bila Jokowi terpilih sebagai presiden ke-7. Kasus pengadaan Bus Transjakarta yang bermasalah dan diimpor dari China dianggap menjadi bukti siapa yang berada di belakang Jokowi.

Selain itu, beredar isu bahwa popularitas Jokowi selama ini ditopang oleh para cukong. Cukong-cukong itu diduga membiayai seluruh pencitraan Jokowi baik di media massa maupun di media elektronik. Dugaan ini berasumsi bahwa pencitraan media tentang sosok Jokowi dianggap sangat berlebihan dan menunjukkan adanya *grand design* untuk tujuan-tujuan politik tertentu. Dengan asumsi-asumsi ini, Pilpres 2014 mengandung kompleksitas dengan potensi konflik tripartit yang kian jelas.

¹¹Tuduhan ini disebarkan melalui majalah Obor Rakyat yang isinya sangat menyudutkan Jokowi Widodo. Juga twitter yang dilakukan oleh Akun Triomacan2000 yang dengan analisisnya mendeskripsikan Jokowi Widodo sebagai antek asing, China, dan kepanjangan tangan dari Kristen.

¹²Dalam sejarahnya, konflik antara etnis China dan Nusantara terjadi sejak masa pra-kemerdekaan. Mulai dari zaman Majaoahit, penyerbuan Keraton Kartasura, hingga kerusuhan massal 12-13 Mei tahun 1998. Dan konflik ini terus menjadi bom waktu di masa-masa yang akan datang, bila situasi-situasi tertentu memicunya (seperti kesenjangan sosial dan ekonomi). Sebagai perbandingan lihat Richard Robison, Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia, terj. Harsutejo (Jakarta: Penerbit Komunitas Bambu, 2012).

Perlu dicatat bahwa asumsi-asumsi itu di-*blow up* bukan saja oleh massa awam, tetapi anehnya oleh oknum-oknum akademisi. Tak pelak, persepsi publik terpengaruh oleh asumsi-asumsi ini. Motivasi memilih Capres-Cawapres, karena itu, bisa juga berbelok menjadi sangat teologis, rasis, dan ideologis. Salah seorang tokoh dan profesor, misalnya, menyatakan bahwa Pilpres 2014 kali ini adalah sebuah perang mirip Perang Badar. Penggambaran “Perang Badar”, tentu saja, sangat berlebihan dan bisa memicu kompetisi yang tidak sehat. Perang Badar adalah simbol kebangkitan Islam awal ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dengan meletakkan fondasi negara Islam pertama yang menentukan sejarah peradaban Islam sesudahnya. Perang Badar adalah titik balik bagi Islam untuk menentukan garis-garis perjuangan Islam ke seluruh penjuru alam.

Jika yel-yel dan ungkapan-ungkapannya sangat simbolik Islam sebagaimana disebut di atas, maka disadari atau tidak akan memengaruhi motivasi-motivasi para pemilih di TPS pada tanggal 9 juli nanti. Selain itu, bisa mempertebal sentimen aliran dan SARA. Semuanya ini menunjukkan bahwa *head to head* dua pasangan Capres-Cawapres akan kian seru dan terus memproduksi sentimen-sentimen bernuansa SARA. Kita bisa membuat asumsi bahwa jika para elitnya saja rasis, maka di tingkat akar rumput akan mengikuti. Ini, misalnya, ditunjukkan – meski keterkaitannya dengan sentimen politik Pilpres perlu diselidiki – penyerangan terhadap Jemaat Katolik di Sleman yang sedang menunaikan ritual. Peristiwa penyerangan ini sebagian disebutkan sebagai artikulasi dari suhu politik Pilpres yang terus memanas.

Jadi, potensi konflik tripartit akan membayangkan-bayangi proses hajatan Pilpres 2014 ini. Sebagai negara demokrasi ketiga di dunia, Indonesia sedang menjadi sorotan dunia dan banyak kepentingan yang ikut bermain. Amin Rais, misalnya, mengkritik ketika Megawati dan Jokowi berkunjung ke Dubes Amerika. Menurut Amin Rais, tidaklah pantas seorang pimpinan partai politik besar dan calon presiden bersimpuh di hadapan kepentingan asing dengan berkunjung ke sana. Pernyataan tokoh Muhamadiyah ini tentu sangat bergaung karena beliau seorang yang sangat kritis pada kepentingan asing. Dalam banyak hal, suplai informasi massa berasal dari para elit yang menyusun argumen dengan sangat canggih. Terjadi transfer ‘ideologi’ atau ‘teologi’ dari kaum elit ke akar rumput. Dari ide-ide lalu berlanjut pada perilaku-perilaku. Jika ide-ide itu bernada permusuhan dan kebencian maka berpengaruh pada perilaku-perilaku yang bermusuhan dan penuh kebencian.

Nah sialnya, media massa dan elektronik ikut mengipasi.¹³ Sejumlah televisi dan media massa tidak lagi netral. Opini-opini yang dibangun mewakili partai atau pilihan pemiliknya atau cukong yang berkepentingan. Prinsip pemberitaan yang *cover both side* terkesan diabaikan dan lebih menuruti para pemesannya. Dengan demikian, rakyat digiring kepada opini permusuhan dan kebencian. Rakyat merasa terlibat secara emosional dan seolah berada dalam arena pertarungan yang sebisa mungkin membela tanpa *reserve* pasangan Capres-Cawapres pilihannya. Ditambah dengan debat-debat para pendukung kedua pasangan di media elektronik yang sangat emosional, maka lengkap sudah nada intoleransi dan kebencian antar massa pendukung.

¹³Seperti diketahui selama kampanye Pilpres 2014 pertarungan antar media massa dan elektronik sangat keras. TV One dan Metro TV saling menyerang Capres-Cawapres masing-masing. Kompas, Majalah Tempo, dan media massa lokal juga tak terhindarkan terlibat dalam arena konflik opini.

Apakah potensi konflik tripartit sebagaimana diasumsikan di atas akan menjadi nyata? Tentu saja jawabannya terletak pada usaha para elit, pemerintah, dan aparat keamanan dalam menangani manajemen konflik. Di satu sisi, demokrasi membolehkan kebebasan dan memungkinkan setiap orang menyatakan pendapat. Namun di sisi lainnya, ancaman konflik sangat mudah terjadi. Apalagi demokrasi di Indonesia disebut banyak pengamat belum matang sehingga potensi konfliknya sangat tinggi.

Namun begitu, ada potensi lawannya yaitu kearifan lokal, kearifan tradisi, adat-istiadat, dan nilai-nilai luhur dari bangsa yang bisa mengerem potensi konflik. Nilai-nilai tersebut dalam praktik hidup berbangsa dan bernegara telah terbukti menciptakan tata tertib masyarakat serta hidup berdampingan secara harmoni.¹⁴ Peran kearifan lokal dan tradisi luhur bangsa harus didorong untuk mengimbangi potensi konflik antar pendukung dua pasangan Capres-Cawapres. Ditambah dengan aparat yang tanggap dan selalu waspada, maka bisa jadi potensi konflik tersebut menjadi anti-klimaks.

Yang lebih penting lagi adalah peran kaum agamawan untuk mendinginkan suhu politik Pilpres. Caranya dengan menyajikan ajaran-ajaran agama yang cair, penuh kasih, menyapa semua agama, dan bersikap netral dalam Pilpres. Juga memisahkan ranah politik praktis dari ranah ajaran agama.¹⁵ Saya kira, masih banyak tokoh-tokoh agama yang netral dan mampu menjalankan misi *rahmatan lil-alamin* bagi kepentingan bangsa dan negara. Mereka bisa memainkan peran mediasi dan menggerakkan *high politics* atau politik adiluhung melalui kekuatan pengaruh serta kharismanya.

Memang peran ini tidak mudah ketika semua media massa dan elektronik tidak lagi bersikap imparisial. Juga bisa karena semua ulama telah terpolarisasi pada dua kubu sehingga sulit bersikap netral – terutama pihak yang memandang Pilpres 2014 merepresentasikan pertarungan antara NU versus Muhammadiyah. Meskipun sulit, para tokoh agama pada kenyataannya memiliki jarak yang sangat dekat dengan massa atau umat. Di masjid, mushalla, gereja, pura, dan wihara mereka bisa memainkan peran pendidikan politik dan demokrasi. Transfer politik adiluhung sangat mungkin untuk diperankan.

Selain itu, kaum cendekiawan juga sangat strategis dalam meredam potensi konflik antar massa pendukung. Mereka memiliki massa, baik melalui Ormas-Ormas kegamaan maupun sosial. Pikiran-pikiran kaum cendekiawan juga sangat didengar para mahasiswa di kampus-kampus.¹⁶ Jumlah massa Ormas dan mahasiswa di Indonesia itu sangat besar dan merupakan deposit politik sangat penting. Karena itu, mereka dapat diarahkan pada nilai-nilai demokrasi dan keharusan-keharusan untuk menghargai perbedaan. Singkatnya, pada level masing-masing peran para tokoh agama dan kaum cendekiawan cukup penting untuk dimainkan dalam peredaman suhu politik yang memanas jelang Pilpres 9 Juli dan sesudahnya.

¹⁴Lihat Irwan Abdullah, "Kondisi Sosial yang Dibayangi Disintegrasi Tanpa Ujung" dalam Indonesia Abad XI Di Tengah Kepungan Perubahan Global (Jakarta: Kompas, 2000), h. 48-49.

¹⁵Bandingkan Nurcholish Madjid, Islam, Doktrin, dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan (Jakarta: Penerbit Paramadina, 2000), Cet. IV, h. 112.

¹⁶Kaum cendekiawan termasuk kelompok elit strategis yang melalui karya-karya mereka dapat memengaruhi gagasan-gagasan publik. Dari merekalah transformasi moral dan perubahan sosial terjadi. Ini bisa dimanfaatkan untuk mendorong watak demokratis yang secara sadar menerima perbedaan. Lihat sebagai perbandingan karya Arnold J. Toynbe, *A Study of History* (London: Oxford University, 1956), Vol. II.

E. Penutup

Riak-riak konflik antar massa dan bahkan antar agama menjelang Pilpres 2014 sudah terasa ada. Bahkan bila membaca pernyataan-pernyataan bernada SARA di media sosial, kita merasa sangat risih dan seperti kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia yang dikenal sangat ramah dan toleran. Kita menjadi risih karena pernyataan-pernyataan itu menandai dan merupakan bentuk gejolak batin massa pendukung kedua pasangan Capres-Cawapres. Apalagi gejolak perasaan itu dibungkus oleh ayat-ayat Tuhan yang memperbesar efek sentimen SARA.

Pilpres 2014 ini, menurut saya, kental dengan isu-isu SARA. Hal ini terjadi bukan saja karena dua Capres memiliki keunikan latar belakang keluarga, tetapi juga partai-partai pengusungnya merepresentasikan dua kubu yang sangat diametral. Meski tidak seluruhnya, dua pasangan tersebut mengartikulasikan dua kompetisi antara partai merah dan partai hijau. Dengan segenap konsep dan ide yang melingkupi dua pasangan tersebut, kompetisi ini menjadi sangat seru dan tak jarang mengarah pada isu-isu SARA. Itulah sebabnya, toleransi antar dan intra agama menjadi sangat rapuh.

Di tengah suhu politik yang memanas, kaum radikal yang berideologi transnasional bisa mengambil kesempatan di air keruh. Kaum radikal tidak berminat pada kebaikan-kebaikan bangsa, tapi lebih pada kebaikan teologinya di dunia. Yang dibela adalah kepentingan umat sejagad. Isu-isu politik Timur Tengah ikut mendramatisasi politik Tanah Air yang sedang mengusung dua pasangan Capres yang sedang bersaing menerima mandat rakyat untuk mengelola negara yang mayoritas Muslim. Inilah fakta-fakta yang membayangi Pilpres 2014 lalu dan memerlukan manajemen konflik yang spesifik sehingga potensi-potensi konflik itu menjadi anti-klimaks.

Pilpres 2014 telah berlalu, namun pelajaran penting masih bisa diambil hikmahnya. Konflik antar dan intra-agama masih terus menjadi ancaman pada setiap Pemilu. Karena itu,antisipasi itu perlu melibatkan setiap komponen bangsa baik dari unsur agama, LSM, pemerintah, ormas-ormas, dan semua elit politik partai. Mereka adalah para pemimpin yang perannya sangat diperlukan untuk integrasi bangsa. Mereka harus memainkan diri sebagai *civil society* yang mampu merekatkan semua komponen bangsa dalam suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Irwan, "Kondisi Sosial yang Dibayangi Disintegrasi Tanpa Ujung" dalam *Indonesia Abad XI Di Tengah Kepungan Perubahan Global* (Jakarta: Kompas, 2000).
- Abdullah, Mudhofir, *Jihad Tanpa Kekerasan* (Jakarta: Inti Medina, 2009).
- Barthes, Roland, *Elements of Semiology* (New York: Hill and Wang, 1976).
- Epley, Jennifer L., *Voices of the Faithful: Religion and Politics in Contemporary Indonesia*, Dissertation (Michigan: The University of Michigan Press, 2010).
- Muhammad Hanif Hassan, *Unlicensed to Kill: Countering Imam Samudra's Justification for the Bali Bombing* (Singapore: Singapore Book Press, 2005).
- Madjid, Nurcholish, *Islam, Doktrin, dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan* (Jakarta: Penerbit Paramadina, 2000), Cet. IV.
- Reichley, A. James, *Religion in American Public Life* (Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1985).
- Robison, Richard. *Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia*, terj. Harsutejo (Jakarta: Penerbit Komunitas Bambu, 2012).
- Toynbe, Arnold J. *A Study of History* (London: Oxford University, 1956), Vol. II.